



**PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PERAN
INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA
PEMERINTAH KOTA
MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

ORIK ILHAM FADLI

1915100291

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH DAN PERAN INTERNAL AUDIT TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

NAMA : ORIK ILHAM FADLI
N.P.M : 1915100291
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 20 Februari 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dra Mariyam, MSi., Ak.

PEMBIMBING II



Doni Efrizah, S.S., M.S.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ORIK ILHAM FADLI
NPM : 1915100291
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS /AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH DAN PERAN INTERNAL AUDIT
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



(ORIK ILHAM FADLI)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ORIK ILHAM FADLI
Tempat/Tanggal lahir : Aceh, 24 Januari 2001
NPM : 1915100291
Fakultas : Sosial Sains
Program Stud : Akuntansi
Alamat : Jln. Tapak tuan-Medan, Aceh selatan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Febuari 2024

t pernyataan


(ORIK ILHAM FADLI)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui lebih jelas bagaimana pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Medan. Adapun permasalahannya yang penulis angkat yaitu: apakah pemanfaatan sistem informasi akuntan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, apakah peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan dan apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pada pemerintah kota medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang melibatkan 60 orang responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pembagian kuisioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistik, yakni dengan menggunakan analisis regresi berganda yang diolah dengan program SPSS Versi 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemanfaatan sistem informasi akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan, Peran Internal Audit secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pada Pemerintah Kota Medan, dan Pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan peran internal audit secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pada Pemerintah Kota Medan.

**Kata Kunci : Pemanfaatan sistem informasi akuntansi, Peran internal audit,
Kualitas laporan keuangan**

ABSTRACT

This study aims to test and find out more clearly how the effect of Regional Financial Accounting Information System Utilisation and the Role of Internal Audit on the Quality of Financial Statements at the Medan City Government. The problems that the author raises are: whether the utilisation of regional financial accounting information systems has a positive and significant effect on the quality of financial reports, whether the role of internal audit has a positive and significant effect on financial reports and whether the utilisation of regional financial accounting information systems and the role of internal audit have a positive and significant effect on financial reports in the Medan city government.

This study uses a quantitative method involving 60 respondents. Data collection was carried out using the distribution of questionnaires. The data obtained was analysed using a statistical formula, namely by using multiple regression analysis processed with the SPSS Version 25 program. The results of the analysis show that the utilisation of accounting information systems partially has a positive and significant effect on the quality of financial reports in the Medan City Government, the role of internal audit partially has a positive and significant effect on the quality of financial reports in the Medan City Government, and the utilisation of accounting information systems and the role of internal audit simultaneously has a positive and significant effect on the quality of financial reports in the Medan City Government.

Keywords : *Financial Accounting Information System Utilisation, the Role of Internal Audit, Quality of Financial Statements*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya penulis dapat mengajukan skripsi ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk pembuatan skripsi. Adapun judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: **“Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Medan”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini nantinya akan menghadapi banyak permasalahan dan kesulitan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk ini, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Karna itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H Muhammad Isa Indrawan, S.E., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak Dr. E Rusiadi, S.E., CiQaR., CIQnR., CIMMR selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar S.E., M,Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Dra. Mariyam Ak, M,Si, CA selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Ibu Doni Efrizah, S.S., M.S., selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang sudah banyak membantu untuk perbaikan sistematika penulisan skripsi saya

6. Seluruh Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi khususnya Bapak Bagus Handoko S.E, M,Si yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
7. Kakak saya yang telah memberikan dukungan penuh sehingga saya bisa kuliah di Universitas Pembangunan Panca Budi.
8. Kedua Orang Tua saya Asliah S.Pd dan Faridah S.Pd yang telah mendukung dan mendoakan saya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna alam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Medan, Febuari 2024

ORIK ILHAM FADLI
1915100291

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN UJIAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.3. Rumusan Masalah	13
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	13
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	14
1.5. Keaslian Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Landasan Teori	16
2.1.1. <i>Agency Theory</i>	16
2.1.2. Kualitas Laporan Keuangan	17
2.1.3. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	20
2.1.4. Peran Internal Audit (Inspektorat).....	27
2.2. Penelitian Terdahulu	35
2.4. Hipotesis Penelitian.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Pendekatan Penelitian	44
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.2.1 Tempat Penelitian.....	44
3.2.2 Waktu Penelitian	45
3.3 Definisi Operasional Variabel	45
3.3.1 Variabel Penelitian	45
3.3.2 Definisi Operasional.....	45
3.4 Populasi dan Sampel	47

3.4.1 Populasi	47
3.4.2 Sampel.....	47
3.5 Jenis dan Sumber Data	48
3.6 Metode Pengumpulan Data	48
3.7 Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Hasil Penelitian	57
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	57
4.1.2. Deskripsi Karakteristik Responden.....	65
4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian.....	67
4.1.4. Uji Kualitas Data	81
4.1.5. Uji Asumsi Klasik	85
4.1.6. Regresi Linear Berganda.....	89
4.1.7. Uji Kesesuaian (<i>Test Goodness Of Fit</i>).....	91
4.1.8. Koefisien Determinasi.....	93
4.2. Pembahasan.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1. Kesimpulan.....	97
5.1. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	102
BIODATA	125

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1. Rincian dan Waktu Jadwal Kegiatan Penelitian	44
Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel	45
Tabel 3.3. Sampel Penelitian	47
Tabel 3.4. Skala likert	49
Tabel 3.5. Tingkatan Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha	53
Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	64
Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	65
Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	65
Tabel 4.4. Jawaban Responden Tentang X _{1.1}	67
Tabel 4.5. Jawaban Responden Tentang X _{1.2}	67
Tabel 4.6. Jawaban Responden Tentang X _{1.3}	68
Tabel 4.7. Jawaban Responden Tentang X _{1.4}	69
Tabel 4.8. Jawaban Responden Tentang X _{1.5}	69
Tabel 4.9. Jawaban Responden Tentang X _{2.1}	70
Tabel 4.10. Jawaban Responden Tentang X _{2.2}	71
Tabel 4.11. Jawaban Responden Tentang X _{2.3}	71
Tabel 4.12. Jawaban Responden Tentang X _{2.4}	72
Tabel 4.13. Jawaban Responden Tentang X _{2.5}	73
Tabel 4.14. Jawaban Responden Tentang Y.1	74
Tabel 4.15. Jawaban Responden Tentang Y.2	74
Tabel 4.16. Jawaban Responden Tentang Y.3	75
Tabel 4.17. Jawaban Responden Tentang Y.4.....	76
Tabel 4.18. Jawaban Responden Tentang Y.5	77
Tabel 4.19. Jawaban Responden Tentang Y.6.....	77
Tabel 4.20. Jawaban Responden Tentang Y.7	78
Tabel 4.21. Jawaban Responden Tentang Y.8.....	79
Tabel 4.22. Jawaban Responden Tentang Y.9	79
Tabel 4.23. Hasil Uji Validitas Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah	81
Tabel 4.24. Hasil Uji Validitas Peran Internal Audit	81
Tabel 4.25. Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan	82
Tabel 4.26. Hasil Uji Reliabilitas Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah	83
Tabel 4.27. Hasil Uji Reliabilitas Peran Internal Audit	83
Tabel 4.28. Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan	84

Tabel 4.29	Hasil Uji Reliabilitas Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, Peran Internal Audit dan Kualitas Laporan Keuangan	84
Tabel 4.30	Hasil Multikolinieritas	87
Tabel 4.31	Hasil Regresi Linear Berganda	89
Tabel 4.32	Uji Parsial	90
Tabel 4.33	Uji Simultan	91
Tabel 4.34	Koefisien Determinasi	92

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	41
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemko Medan	59
Gambar 4.2. Layar SIKD dan Tampilan Menu	65
Gambar 4.3. PP-Plot Uji Normalitas	85
Gambar 4.4. Histogram Uji Normalitas	86
Gambar 4.5. <i>Scatterplot</i> Uji Heteroskedastisitas	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas berarti bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang membutuhkan. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2018).

Pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk menyalurkan informasinya berupa laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas atas kegiatan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan dituntut memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Informasi yang disajikan oleh pemerintah digunakan oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusan, maka dari itu informasi yang diberikan harus berkualitas. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Pemerintah dalam mengelola keuangan, melakukan reformasi UU Keuangan negara dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban APBN atau APBD disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (Untary & Ardiyanto, 2017). Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.07/2020 didalamnya telah tertuang tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, Dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).

Swardjono (2018) menyatakan bahwa tujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasi non bisnis seperti unit-unit pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan

rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Menurut Yuliani (2020) rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan atau lemahnya peran internal audit.

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada

prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Menurut Bastian (2017: 318) bahwa tahapan proses akuntansi meliputi transaksi, analisis bukti transaksi, mencatat data transaksi, mengelompokkan dan mengikhtisarkan data yang dicatat (posting) dan penerbitan laporan dan catatannya Roviyantie (2017) menyebutkan bahwa Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Dalam dunia pemerintahan, setiap bagian dalam pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki tupoksi yang telah ditentukan. Begitupun bagian keuangan yang harus diisi oleh SDM yang memiliki kompetensi dalam memahami akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya. Selain pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien.

Saat ini SKPD telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi, dimana menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola dan didayagunakan oleh berbagai pihak dan

masyarakat luas. Sistem informasi tersebut dikenal dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah

Pelaporan finansial pemerintahan di Kota Medan adalah fenomena yang menarik untuk diteliti dikarenakan terdapat peningkatan atas tuntutan akuntabilitas terutama untuk instansi-instansi publik baik di daerah hingga pusat karena nyatanya, pada pelaporan finansial pemerintahan terdapat banyak data yang tidak dilaporkan sesuai dengan kenyataan yang didapati oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti ditemukan adanya ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP dan/atau ketidakcukupan bukti yang dijumpai dalam LKPD Tahun 2019 antara lain terdapat pada akun:

- a. Aset Lancar dimana Kas di kas daerah disajikan tidak sesuai dengan SAP yang berdampak pada lebih saji kas di Neraca dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang cukup.
- b. Belanja Modal dimana terdapat kelebihan pembayaran belanja modal kepada penyedia jasa atas kekurangan volume fisik dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah sehingga realisasi belanja modal diakui tidak sesuai dengan SAP yang berdampak pada lebih saji aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada Neraca.(LHP BPK RI Tahun 2020).

Mutu informasi pelaporan keuangan yang masih rendah mungkin ditimbulkan akibat sistem informatika akuntansi finansial daerah yang belum diaplikasikan dengan optimal serta kontrol yang kurang ketat (Pujiswara et al., 2014). Oleh karena itu, diperlukan keberadaan maksimalisasi pada penerapan sistem informatika akuntansi finansial daerah serta kontrol yang ketat dalam mengelola anggaran daerah. Seorang akuntansi yang memiliki tingkat pemahaman akuntansi yang tinggi maka mutu akurasi pelaporan keuangan yaitu agar mampu menyelesaikan laporan tepat waktu akan makin baik, menggunakan alat berpikir sesuai dengan tujuannya, dan dapat membuat keputusan yang tepat (Diani, 2014).

Oleh karena itu, tidak hanya mengandalkan teknologi informasi saja tetapi pemahaman akuntansi juga harus di seimbangkan agar laporan keuangan tersebut tetap berkualitas. Suatu pelaporan finansial yang bermutu turut diperlukan adanya individu yang mahir, yang mana kapabilitas tenaga kerja amat dibutuhkan untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang mampu mencukupi kriteria kualitatif pelaporan keuangan. Pada PP No. 71 Tahun 2010, kriteria kualitatif pelaporan keuangan pemerintah adalah ketentuan normatif supaya pelaporan finansial pemerintahan memiliki mutu yang diinginkan yakni terpercaya, andal, dapat dibandingkan, dan mudah untuk dipahami.

Saat kita sedang dihadapkan melalui keberadaan Pandemi Covid-19. Di tahun 2020, pandemi mulai meningkat dan Kota Medan memiliki jumlah tingkat pasien terpapar yang tertinggi kedua setelah Ibukota Jakarta. Dengan adanya pandemi tersebut, apakah kualitas laporan keuangan BPKAD Kota Medan mampu mempertahankan kualitasnya secara efektif atau telah terjadi perubahan terhadap kualitas laporannya. Dikarenakan, seperti yang kita lihat saat ini pada

sektor kesehatan sangat banyak mengeluarkan dana yang cukup tinggi untuk mengatasi Pandemi Covid-19. Sehingga, hal tersebut apakah berdampak juga pada mutu pelaporan keuangan yang mana pelaporan finansial tersebut juga dapat mengalami perubahan menyesuaikan dengan aktivitas transaksi ekonomi yang terjadi. ,mengenai dampak penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemahaman Akuntansi atas mutu pelaporan keuangan dengan audit internal selaku konstruk pengganggu di BPK serta Aset Daerah Kota Medan.

Menurut Ahmad (2019), untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Dalam kerangka ini, UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional. Hal ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah adanya peran internal audit. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan jaminan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo saat memberikan keynote speech pada lokalkarya Aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP).

Laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan selama tahun 2017-2019 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan pada tahun 2020 LKPD Kota Medan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),

hal ini merupakan suatu peningkatan dari tahun tahun sebelumnya, serta mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah cukup baik. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari usaha segenap pihak pemerintah daerah Kota Medan yang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan nilai informasi atas laporan keuangan yang dihasilkan, yang ditempuh melalui berbagai cara, antara lain pemanfaatan teknologi informasi ke dalam proses pengelolaan keuangan daerah, serta pengawasan yang lebih intensif dari aparat pengawas fungsional daerah selain itu peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan dari hal-hal tersebut terdapat hubungan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, serta pemahaman akuntansi dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan dan itegrasi sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya yang lebih baik, efektif dan memadai serta peningkatan sarana dan prasarana, diharapkan dapat menunjang dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel serta menciptakan good governance (Pujiswara dkk, 2018).

Laporan keuangan pemerintah daerah terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan kualitas, salah satunya yaitu penggunaan sistem informasi akuntansi pada instansi pemerintahan yang juga mempunyai peran penting demi kualitas laporan keuangan yang baik. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu sistem informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-

masing OPD dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Yuliana, 2017).

Laporan keuangan yang penyusunannya berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapannya memerlukan sarana pendukung berupa teknologi infomarsi yang berbasis sistem. Teknologi informasi meliputi perangkat lunak, database, jaringan dan jenis lainnya yang berhubungan dengan sistem. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor lain dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, kemampuan yang dimiliki seseorang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Laporan keuangan yang bermanfaat memuat kapasitas sumber daya manusia harus sesuai dengan standar. Pemerintahan daerah dalam menyusun laporan keuangan yang baik lebih banyak ditentukan oleh figur pemimpinnya daripada faktor-faktor lainnya. Pemerintah daerah untuk mendapatkan figur pemimpin yang baik tentu diperlukan sumber daya manusia yang baik).Sistem pengendalian internal juga berperan penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian internal mampu membentuk struktur organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pemerintah daerah. Pemahaman standar akuntansi pemerintahan juga diperlukan agar hasil laporan keungan daerah lebih berkualitas.

Penelitian dari Sukmaningrum dan Harto (2011) yang berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Semarang)

menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, sistem pengendalian intern mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan faktor eksternal yang diprosikan dengan kemajuan IT berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian dari Untary dan Ardiyanto (2019) tentang Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Faktor Eksternal sebagai Pemoderasi (Studi kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah sedangkan faktor eksternal tidak memoderasi pengaruh antara variabel sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Untary dan Ardiyanto (2015). Perbedaan penelitian ini yaitu pertama, adanya pengurangan variabel bebas yaitu pemahaman akuntansi, pengurangan variabel ini dikarenakan laporan keuangan merupakan laporan yang dihasilkan dari disiplin ilmu akuntansi, apabila pemahaman SAP pada sumber daya manusia semakin baik maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Kedua, obyek penelitian ini mengambil sampel pada OPD di Kota Medan. Alasan pemilihan OPD Kota Medan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, selama 3 tahun dari tahun 2017-2019 adalah WDP sedangkan pada tahun 2020 adalah WTP, sehingga apakah aspek

aspek seperti pemanfaatan sistem informasi akuntansi, Internal Audit berpengaruh terhadap peningkatan laporan keuangan Kota Medan tersebut.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejak awal tahun 2002, pemerintah daerah sudah membuat neraca awal daerah dengan mengacu kepada Pedoman SAKD hasil Tim Pokja SK Menkeu 355/2001 dan Kepmendagri 29/2002 dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta praktek-praktek internasional. Hingga saat ini, pemerintah daerah yang telah memiliki neraca daerah sebanyak 169 Pemerintah Daerah berdasarkan hasil asistensi yang dilakukan oleh BPKP sebagai anggota Tim Pokja 355/2001. Akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2009 seluruh Indonesia hanya 10 (sepuluh) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh gelar pendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI. Kota Medan merupakan daerah yang mendapat prediket opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Dari 25 entitas yang ada, 5 kabupaten/kota telah mendapat prediket WTP. Daerah-daerah tersebut adalah Kota Medan, Meraih opini WTP bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan. Untuk 20 entitas lainnya dapat dikatakan kualitas laporan keuangan masih rendah. Rendahnya kualitas laporan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri atau belum diterapkannya

secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan dan atau peran internal audit masih lemah.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena pada Pemerintahan Kota Medan Inkonsistensi pada penelitian beberapa peneliti sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Medan)”**.

1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan belum sepenuhnya disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan penyajian akun aset lancar dan belanja modal pada Laporan Keuangan Kota Medan.
2. Mutu informasi pelaporan keuangan yang masih rendah akibat pemahaman pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang kurang optimal.
3. Adanya perubahan penyesuaian pada pelaporan keuangan yang terdampak akibat Covid-19.
4. Belum maksimalnya peran internal audit dalam mengawasi, mengreview dan mengevaluasi laporan keuangan OPD.

1.2.2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasan dan lebih terperinci, maka permasalahan penelitian dibatasi mengenai ruang lingkup pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan keuangan daerah secara khusus pada pemerintah daerah Kota Medan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah diuraikan di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Medan?
2. Apakah peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Medan?
3. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Medan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Medan.
2. Untuk menganalisis pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Medan.

3. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan internal audit terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Medan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masing-masing pihak sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sebagai bahan pertimbangan dan memberikan pemahaman serta memperkaya wawasan mengenai sistem informasi akuntansi, Peran Internal Audit dan Kualitas laporan keuangan di pemerintahan

b. Manfaat Praktisi

- a. Untuk penulis, penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan internal audit terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah.
- b. Untuk pemerintahan, penelitian ini bisa digunakan sebagai kontribusi dalam penerapan pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan internal audit terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah.
- c. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti yang mengambil judul sama dengan penelitian ini.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dian Irma Diani (2019), yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi

Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Medan)”. Penelitian ini memiliki perbedaan dalam penelitian sebelumnya yaitu terletak pada :

1. Variabel penelitian : penelitian terdahulu menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Internal Audit dan 1 (satu) variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas yaitu pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan Peran Audit Internal dan 1 (satu) variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Jumlah Observasi penelitian terdahulu menggunakan 28 responden. Sedangkan penelitian ini menggunakan 60 Responden.
3. Waktu Penelitian dilakukan pada tahun 2019 sedangkan yang penulis lakukan pada tahun 2024.
4. Tempat penelitian pada penelitian terdahulu di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Sedangkan yang penulis lakukan di Kota Medan, Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Agency Theory*

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas

Teori keagenan merupakan perjanjian antara satu atau lebih prinsipal dengan agen. Teori keagenan merupakan perjanjian yang berisi proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak (Harviy, 2018). Teori keagenan dalam prakteknya terdapat kepentingan yang berbeda antara prinsipal dan agen sehingga menimbulkan konflik kepentingan, untuk meminimalkan konflik tersebut dengan pihak ketiga dengan menggunakan auditor (Artana, 2017).

Berdasarkan hal tersebut berkaitan dengan masalah keagenan, teori keagenan mempelajari hubungan antara agen dan prinsipal. Pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas kepada masyarakat luas, dalam hal ini bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi bagi masyarakat luas sebagai prinsipal. Teori keagenan merupakan teori yang dalam prakteknya terdapat kepentingan yang berbeda antara agen dan prinsipal, dalam pemerintahan

untuk meminimalisir konflik, maka laporan keuangan adalah salah satu hal yang dapat meminimalkan konflik antara pemerintah dan masyarakat luas.

2.1.2. Kualitas Laporan Keuangan

Definisi kualitas menurut Mulyana, (2020) dalam susilawati dan riana, (2014) kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi juga dapat dipahami oleh pemakai informasi.

Menurut Defitri (2018) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat dipahami oleh pemakai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

Menurut (Akhmad Syarifudin, 2014) pelaporan finansial pada hakekatnya adalah asersi dari pihak pengelola pemerintahan yang memberikan informasi terkait status finansial pemerintahan untuk pemegang kepentingan. Dengan dilakukannya laporan keuangan tersebut dapat mempermudah pemerintahan dalam melaksanakan kewajibannya yaitu agar dapat dipertanggungjawabkan untuk khalayak umum. Selain itu, laporan finansial juga dapat mendukung pemenuhan kepentingan individu yang menggunakan pelaporan finansial yang mempunyai tanggung jawab dan kapabilitas yang terbatas dalam mendapatkan suatu informasi. Maka dari itu, pelaporan finansial ini sangat penting selaku sumber informasi.

Standar akuntansi laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memnuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut.

Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut (Nurillah, 2018). Pemerintah menyusun laporan keuangan ditunjukkan untuk pengambilan keputusan. Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2018 : KK-10) berpendapat bahwa karaktersitik laporan keuangan adalah ukuran-

ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami.

1. Relevan yaitu apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan membantu mengevaluasi dan mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.
2. Andal keandalan informasi bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.
3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode seelumnya.
4. Dapat dipahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna (Nurillah, 2014).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2018 :KK10) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan kesalahan material, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

2.1.3. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

1. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Pemerintah daerah sebagai organisasi publik diperlukan dukungan dari sistem informasi akuntansi supaya dapat berjalan efektif, efisien, bersih, dan transparansi sehingga dapat digunakan untuk pengendalian keputusan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi untuk mendukung sistem informasi keuangan daerah. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Sistem Informasi akuntansi pada pemerintah daerah dikenal dengan nama Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Sistem Infomasi Akuntansi bertitik tolak dari suatu landasan yang terdiri dari berbagai konsep, yaitu konsep mengenai akuntansi itu sendiri, konsep sistem, konsep informasi. Berdasarkan hal itu maka di bawah ini akan di uraikan mengenai konsep-konsep tersebut, Yenita Fitriani (2021).

a. Konsep Sistem

Definisi sistem menurut Marshall B Romney, Paul John Steinbart dalam bukunya yang berjudul *Accounting Information System* yang telah disadur dalam Bahasa Indonesia, menyebutkan bahawa: “Sistem merupakan rangkain dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”. Definisi sistem menurut Jogyanto dalam bukunya yang berjudul “*Analisis dan Desain Sistem Informasi*” menyebutkan bahwa: “Sistem sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komputer atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”. Sistem merupakan sebagai suatu kelompok yang terdiri atas komponen-komponen (fungsi, manusia, aktifitas, dan lain-lain) yang saling berhubungan dan saling mendukung untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian sistem menurut Mulyadi adalah “Suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”. Sedangkan menurut Romney “Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”.

b. Konsep Informasi

Informasi merupakan data yang sudah dimanifestasikan dalam bentuk tertentu, sehingga bagi yang memerlukannya merupakan sesuatu yang berguna, mempunyai atau diharapkan akan mempunyai nilai nyata sebagai sarana dalam

proses pengolahan data menjadi informasi. Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata. Maka secara sederhananya, informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diolah. Beberapa ahli pun menguraikan pengertian masing-masing, diantaranya : Menurut Robert N. Anthony dan John Dearden dalam buku Jogiyanto “Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi yang menerimanya”.

c. Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah mengorganisasikan sumber daya manusia, perangkat keras dan piranti lunak komputer yang saling berinteraksi untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi pemakainya. Tujuan dari sistem informasi adalah menyajikan informasi untuk mengambil keputusan pada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, kegiatan operasi subsistem suatu perusahaan, sehingga dapat diambil kesimpulan sistem informasi memberi suatu cara untuk memandang suatu organisasi sebagai suatu keseluruhan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas.

d. Konsep Sistem Informasi

Sistem Informasi Akuntansi digunakan untuk mengolah data. Data yang diolah sistem informasi akuntansi adalah yang bersifat keuangan. Sistem informasi akuntansi hanya terbatas pada pengolahan data yang bersiddat keuangan saja, sehingga informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi hanya informasi keuangan saja.

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.

Terdapat enam komponen dari sistem informasi akuntansi, yaitu :

- 1) Orang yang menggunakan sistem.
- 2) Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data
- 3) Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya.
- 4) Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data.
- 5) Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat periferial, dan perangkat jaringan yang digunakan dalam SIA.
- 6) Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 menyatakan bahwa SIKD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan juga data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Penggunaan sistem informasi akuntansi finansial daerah merupakan penggunaan sistem informasi keuangan daerah dari setiap SKPD pada kegiatan menyusun pelaporan keuangan pemerintahan daerah. Menurut (Rosmalita & Nadirsyah, 2020). Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah merupakan sistematis yang melakukan pengelolaan anggaran daerah serta informasi berkaitan yang dapat dijadikan sebuah data untuk dilaporkan secara transparan untuk penduduk serta menjadi materi agar dapat mengambil suatu keputusan pada pemerintah daerah. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah ini merupakan contoh aspek pendukung terkait dengan kualitas laporan keuangan, karena pelaporan finansial diperoleh dari rangkaian tahapan yang mana tahap tersebut didasari oleh proses yang sesuai serta input & output yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga diperlukan sistem yang mengelola pengelompokan serta pelaporan semua transaksi finansial yang berjalan pada proses pengelolaan serta penyusunan finansial daerah.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Rianisanti, 2017).

Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan serangkaian mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem informasi keuangan daerah dapat membuka peluang dalam mengakses informasi keuangan dan mengelola informasi tersebut secara cepat dan akurat hal tersebut dapat diwujudkan apabila dapat memanfaatkan teknologi informasi yang baik. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah merupakan aplikasi yang mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan Satuan Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan (Setyowati,dkk:2019).

Seiring diberlakukannya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapannya memerlukan sarana pendukung berupa teknologi informasi yang berbasis sistem. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (internet, intranet), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah dengan tujuan, antara lain:

- a. Membantu kepala daerah menyusun anggaran dan laporan pengelolaan keuangan daerah
- b. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan

- c. Membantu kepala daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah
- d. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah
- e. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahan untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka pengelolaan dan akses terhadap keuangan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah demi kepentingan publik yang secara keseluruhan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan penyederhanaan akses antara unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

2. Indikator Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Indikator dari sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut: (Modul SIA, 2018).

- a. Tingkat kecepatan
- b. Tingkat keamanan
- c. Tingkat efisiensi biaya
- d. Tingkat kualitas hasil

2.1.4. Peran Internal Audit (Inspektorat)

The Institute of Internal Auditor (1999) dalam Yuliani (2010) menyatakan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi. Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah yang berada di bawah bertanggungjawab kepada Walikota.

Pengendalian internal adalah cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan pencegahan dan mendeteksi adanya kecurangan. Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan. *The Institute of Internal Audit* dalam Yuliani (2018) menyatakan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau

menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Nurillah, 2018). Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Pengendalian internal akuntansi, berfungsi sebagai mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh : adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.
- b. Pengendalian administratif, berfungsi untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contoh: adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang digunakan agar informasi yang dihasilkan tepat dan akurat (Untary & Ardiyanto, 2015). Lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan pada pernyataan COSO yaitu

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian risiko
- c. Aktivitas pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pengawasan

Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif. Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan pemerintah dalam

memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.

Audit internal merupakan sebuah tahap sistematis yang secara objektif mengumpulkan serta mengkaji bukti yang berkaitan dengan statement aktivitas maupun peristiwa ekonomi guna melakukan penilaian tingkatan keselarasan diantara statement dengan ketentuan yang ada dan untuk menyampaikan temuannya untuk pemangku kepentingan. Menurut (Suharti dan A. Yusuf, 2013) Audit internal tersebut mendukung instansi dalam pencapaian tujuan melalui pendekatan disiplin serta terstruktur guna melakukan evaluasi serta memaksimalkan keefektifan pengelolaan resiko, kontrol serta proses pengelolaan itu sendiri

Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Inspektorat dipimpin oleh inspektur dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota. Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Sektor Publik STAN (2007) tujuan utama dari inspektorat adalah membantu Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Fungsi Inspektorat adalah:

1. Mereview penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah secara berkala untuk menentukan apakah penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

2. Menentukan kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian akuntansi dan operasional di lingkungan pemerintahan daerah.
3. Mereview keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional dan alat-alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
4. Mereview sistem yang digunakan untuk memastikan ketaatan terhadap berbagai kebijakan, rencana, prosedur, undangundang, dan regulasi yang dapat berpengaruh terhadap operasional, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaporannya, serta menentukan kepatuhannya. Bila perlu, memberikan saran kebijakan.
5. Mereview alat-alat yang digunakan untuk mengamankan kekayaan daerah dan menverifikasi keberadaan kekayaan daerah tersebut.
6. Menilai tingkat efesiensi dan ekonomis sumber-sumber yang digunakan, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja operasional daerah, dan merekomendasikan solusi yang sesuai atas permasalahan yang timbul.
7. Mereview kegiatan dan program dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu untuk memastikan apakah hasil yang dicapai konsisten dengan tujuan dan sasarannya, dan apakah kegiatan dan program dilaksanakan sesuai dengan rencana.
8. Menyajikan tindak lanjut yang memadai untuk memastikan tindakan perbaikan dilakukan dan cukup efektif.
9. Mengkoordinasi pekerjaan audit dengan aparat pengawasan (auditor) eksternal (BPK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 2 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa inspektorat melakukan pengawasan atas pengawasan pemerintahan daerah meliputi:

a. Melakukan Pengawasan Administrasi Pemerintah

Pengawasan administrasi pemerintahan dilakukan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

b. Melakukan Pengawasan Urusan Pemerintah

Pengawasan urusan daerah dilakukan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah Kabupaten-/Kota. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada Bupati/Walikota.

Pengawasan intern di Kabupaten-/Kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disebut inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur Dan Bupati/Walikota bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern perlu dilakukan beberapa hal yaitu:

1. Melakukan Pengawasan Intern Atas Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi

Pengawasan intern dilakukan oleh inspektorat daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah dengan tugas pokoknya antara lain:

a) Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern sebagai berikut:

- 1) Dilakukannya pengukuran kinerja penyelenggara pemerintah daerah
- 2) Dikembangkannya sistem informasi evaluasi penyelenggara pemerintah daerah.

2. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi dan berjalan sesuai dengan rencana Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern sebagai berikut:

- a) Dirumuskannya prosedur yang menggambarkan langkah-langkahnya untuk memenuhi kebijakan dan dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan.
- b) ditetapkannya kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelola keuangan daerah.

3. Menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- a) Dilaksanakan SPI atas pengelola keuangan daerah oleh SKPD
- b) Dilaksanakannya transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD

- c) Tersusunnya laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4. Menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah
- Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:
- a) Dilaksanakannya pelaporan keuangan SKPD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas.
 - b) Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap dan akurat.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Pelaksanaan pengawasan yang terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah dilakukan tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah Kabupaen; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam piagam pengawasan intern (*Internal audit charter*) tahun 2017 Pengawasan internal mengacu pada seluruh proses audit, peninjauan, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan misi, fungsi, dan tata kelola organisasi guna memberikan keyakinan yang cukup bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi dan manfaat kepemimpinan dari tata kelola yang baik., yang mana :

- a. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesioal berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efesiensi dan keandalan informasi peaksanaan tugas dan fungsi Instansi pemerintah
- b. Reviu adalah penelahaan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikajn bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan
- c. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

- d. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah diteapkan

2.2. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Mardiana dan Fahlevi,(2017)	Pengaruh pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual , kualitas laporan keuangan.	Regresi Linear Berganda	Pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh.
2	Tawaqal dan Suparno, (2017)	Penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian	Regresi Linear Berganda	Penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara

		internal, dan kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah		simultan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.
3	Kiranayanti dan Erawati, (2018)	Pemahaman sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual	Uji Regresi Linear Berganda	Pengendalian internal sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
4	Yuliana Dkk (2018)	Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit.	Uji Regresi Linear Berganda	Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh.
5	Untary dan Ardianto (2017)	Sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian	Uji Regresi Linear Berganda	Sistem akuntansi, SPI, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas

		intern dan kompetensi sumber daya manusia		laporan keuangan, sedangkan faktor eksternal tidak memoderasi pengaruh anatara variabel SIA,SPI, dan kompetensi sumber daya manusia
6	Zuliarti (2019)	Nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi	Deskriptif Kualitatif	Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan, SPIP,dan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan
7	Indriasari dan Nahartyo (2020)	Nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi	Uji Analisis Linera Berganda	Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi kapasitas SDM berpengaruh negatif.
8	Sukmanongrum dan Harto (2018)	Kompetensi SDM, sistem pengendalian	Uji Analisis Linera	Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas

		intern, kualitas laporan keuangan	Berganda	laporan keuangan sedangkan kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Faktor eksternal tidak memoderasi pengaruh kompetensi SDM dan SPI terhadap kualitas laporan keuangan.
--	--	-----------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Penulis (2024)

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan Internal Audit daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa atau digambarkan bagaimana hubungan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_1) dan Internal Audit (X_2). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y).

1. Hubungan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagian bahan

pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Yuliana, 2018). Berkembangnya teknologi yang semakin maju, menuntut setiap orang dituntut terampil dalam pengelolaan teknologi. Pemerintah dalam tuntutannya dengan akuntabilitas publik akuntansi sektor publik terutama di dalam pemerintahan dituntut untuk memberikan kualitas laporan keuangan yang baik, berdasarkan hal tersebut sistem informasi akuntansi merupakan salah satu faktor yang mendukung terwujudnya kualitas laporan keuangan pemerintahan yang tepat. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu faktor yang penting dalam penyusunan laporan keuangan di era yang canggih seperti zaman sekarang.

Sistem informasi membantu menyajikan data dengan cepat, sehingga pelaporan bisa dilaporkan secara tepat waktu. Sistem Informasi yang semakin baik, maka baik pula penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Pemerintah harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi guna mewujudkan sistem akuntansi yang terpadu, efektif dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Untary dan Ardiyanto (2017) menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin baik, sedangkan penelitian Tawaqal dan Suparno (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan, begitu juga penelitian dari Indriasari dan Nahartyo (2018) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Ahmad (2008), untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. dalam kerangka ini, undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional.

SIKD adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah, sehingga dalam penelitian ini menfokuskan peranan/pemanfaatan SIKD terhadap organisasi pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bagaimana SIKD tersebut berhasil atau diterapkan dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, apa yang dimaksud kesuksesan dari sistem informasi tersebut dan bagaimana membuat sistem informasi tersebut menjadi sukses (jogiyanto, dalam fikri) Astuti (2011) telah melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat apabila masing-masing SKPD memanfaatkan sebaik mungkin sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menduga bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Hubungan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

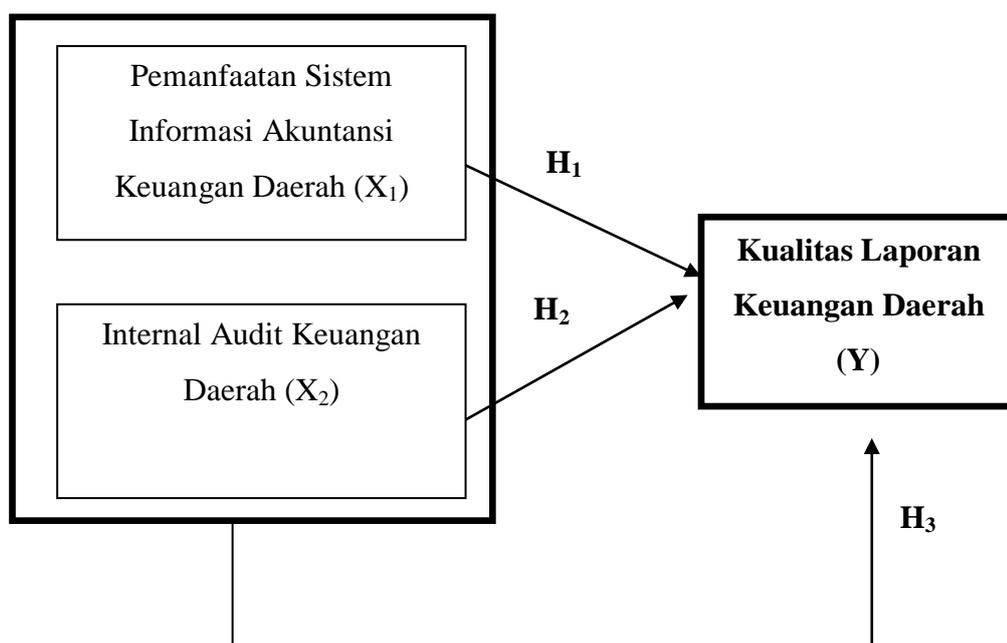
Salah satu faktor yang mempengaruhi maksimalnya hasil audit terhadap kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal yang baik. Penyusunan laporan keuangan yang baik didukung dengan pengawasan internal yang baik pula. Sistem pengendalian internal sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai diharapkan dapat memberikan keyakinan, efektifan dalam kualitas laporan keuangan. Keandalan pelaporan merupakan suatu hal yang penting dalam sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang kurang baik dapat menyebabkan suatu penemuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan keuangan yang masih ditemukan penemuan-penemuan berarti belum dapat mendapatkan opini yang baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintahan harus memperhatikan dalam sistem pengendalian internal agar mendapat laporan keuangan pemerintah yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dkk (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal sangat berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Untary dan Ardiyanto (2018) juga menyatakan bahwa pengendalian internal juga berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang

dihasilkan oleh SKPD, inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangannya. Yenita (2010) telah melakukan penelitian pada instansi pemerintah daerah kota padang, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa peran inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang memiliki keandalan nilai informasi dipengaruhi oleh inspektorat sebagai internal audit. Proses review atas laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses review ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah itu sendiri. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menduga bahwa peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pendapat atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang diajukan yang kebenarannya perlu dibuktikan (Hermawan, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hipotesis sebagai berikut:

1. H_01 : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

H_a1 : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2. H_02 : Internal Audit Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

H_a2 : Internal Audit Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

3. H_03 : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Internal Audit Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

H_a1 : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Internal Audit Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian kuantitatif ialah proses penelitian pengetahuan berdasarkan dengan data yang berbentuk angka yang berguna untuk menganalisis permasalahan yang diteliti sesuai dengan fakta, menggunakan proses analisa, menggunakan hipotesis, serta menggunakan ukuran objektif dan menggunakan data kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial (Ahmadi, 2016).

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian Kuantitatif asosiatif, yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, Sugiyono (2018: 57). Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Hubungan kasual adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, yang terdiri dari variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (variabel yang dipengaruhi) menurut Sugiyono (2018: 59).

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap kantor dinas yang berada dalam yang berada diwilayah Kota Medan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Proses pengumpulan data dilakukan mulai April 2023 sampai dengan November 2023, dapat diketahui pada skedul proses penelitian dalam tabel 3.1 :

Tabel 3. 1 Jadwal Proses Penelitian

Kegiatan	Tahun 2023/2024																							
	Mei				Juni-Juli				Agustus				Sep-Okto				Nov-Des				Jan-Feb			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■	■																					
Penyusunan Proposal				■	■	■	■	■																
Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■								
Seminar Proposal															■	■								
Pengumpulan Data																	■	■	■	■				
Penulisan Skripsi																					■	■	■	■
Perbaikan Skripsi																							■	■
Seminar Hasil																							■	■
Sidang Meja Hijau																								■

Sumber : Diolah Penulis (2024)

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu : variabel Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_1), Internal Audit (X_2), serta 1 (satu) variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan daerah.

3.3.2 Definisi Operasional

Variabel merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, apa yang akan diteliti oleh peneliti sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan.

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Defenisi Variabel	Indikator Variabel	Skala
1.	Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_1)	Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokkan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi untuk mendukung sistem informasi keuangan daerah.	Indikator dari pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut: 1. Tingkat kecepatan 2. Tingkat keamanan 3. Tingkat efisiensi biaya 4. Tingkat kualitas hasil	<i>Likert</i>
2.	Internal Audit (X_2)	Internal audit adalah suatu rangkaian proses dan teknis dimana karyawan suatu perusahaan mencari kepastian atas keakuratan informasi keuangan dan jalannya operasi sesuai dengan yang ditetapkan	Indikator dari pengawasan keuangan daerah adalah sebagai berikut: 1. Integritas 2. Obyektivitas 3. Confidential 4. Kompetensi	<i>Likert</i>
3.	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Kualitas laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)	Indikator dari Transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: 1. Relevan a. Memiliki Umpan Balik b. Tepat Waktu c. Lengkap 2. Andal a. Penyajian Jujur b. Dapat Diverifikasi c. Netralitas	<i>Likert</i>

Sumber : Diolah Penulis (2023)

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan elemen-elemen yang berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Medan berjumlah 60 SKPD yang terdiri dari Dinas dan Badan, Penelitian ini menggunakan *total sampling* dikarenakan populasinya kurang dari 100 objek.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara berhati-hati dari populasi tersebut. Ketika peneliti melakukan penarikan sampel, peneliti tentunya merasa tertarik dalam mengestimasi satu atau lebih populasi atau menguji satu atau lebih hipotesis statistik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari populasi di SKPD di Kota Medan dengan jumlah sampel yang dianggap sudah mewakili/representative dari populasi yang ada. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling*. Kriteria dalam pemilihan sampel Diambil 5 Kantor Dinas yang ada di Kota Medan pemilihan 5 Kantor Dinas ini disesuaikan karena Informasi Akuntansi Keuangan mereka lebih terbuka dan berjalan efektif. Berikut Kantor Dinas yang menjadi sampel yang mewakili

Tabel 3.3 Sampel Penelitian

No	Kantor Dinas	Pegawai mewakili
1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	20
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10
3	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	10
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10
Total		60

Penelitian ini menggunakan total sampling dikarenakan populasinya kurang dari 100 objek yang terdiri dari 60 Responden.

3.5 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Datalialah kumpulan fakta atau angka yang mengungkapkan kebenarannya kemudian menjadi dasar untuk menarik sebuah kesimpulan. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang dianalisa sesuai dengan metode tertentu hingga hasilnya dapat diketahui.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

3.6 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dan digunakan bersifat kuantitaif, terdiri atas data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan memberikan kuesioner kepada responden untuk memperoleh informasi tentang pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan Internal

audit daerah terhadap kualitas sistem keuangan daerah pada pemerintah daerah Kota Medan.

1. Kuesioner

Kuesioner yang digunakan adalah sejumlah pernyataan tertulis untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dari responden. Kuesioner ialah alat pengumpul data dalam bentuk pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis, baik berupa pilihan jawaban pernyataan maupun pertanyaan esai dan diberikan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi yang terkait dengan hal – hal mengenai tanggapan terhadap variabel yang diteliti.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner dengan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian disebut dengan skala Likert. Metode yang dilakukan dalam penilaian ini ialah metode yang digunakan untuk mengetahui sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu keadaan. Skala likert yang digunakan untuk menjawab bagian pernyataan dalam penelitian ini memiliki lima kategori, sebagai berikut:

Tabel 3.4 Skala Likert

Pertanyaan	Skor
SS = Sangat Setuju	5
S = Setuju	4
KS = Kurang Setuju	3
TS = Tidak Setuju	2
STS = Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2018)

Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala likert memiliki nilai dari sangat positif sampai sangat negatif. Skor (1) minimal menunjukkan penilaian

tanggapan paling negatif yang dipilih oleh responden. Sedangkan untuk skor (5) maksimal menunjukkan tanggapan paling positif yang dipilih oleh responden.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis yang dimaksud adalah untuk mengkaji ulang dalam kaitannya dengan pengujian hipotesis penelitian yang telah penulis rumuskan. Menurut Suharsimi Arikunto metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Adapun teknik dalam menganalisis data ialah dengan uji validitas, uji reabilitas, analisis regresi linier berganda dan juga uji hipotesis penelitian.

3.7.1 Uji Deskriptif

Melalui metode ini data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah responden yang menjadi sampel dalam penelitian akan diklasifikasikan, diinterpretasikan, dan dianalisis, sehingga diperoleh gambaran umum tentang masalah yang diteliti.

3.7.2 Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini uji validitas dan reabilitas dilakukan untuk menguji apakah kuesioner layak digunakan sebagai instrumen penelitian atau tidak.

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah kebenaran dan keabsahan instrument penelitian yang digunakan. Uji Validitas bermaksud untuk mengetahui seberapa tepat suatu test melalui fungsi ukurannya suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Tujuan dari uji validitas adalah untuk mengetahui kelayakan suatu pertanyaan dalam mendefinisikan suatu

variabel. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisioner tersebut. Pengujian validitas dalam SPSS dapat menggunakan tiga metode analisis yaitu *bivariate pearson*, *corrected item total correlation*, dan analisis faktor. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan yaitu metode *bivariate pearson* (produk momen pearson).

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk tingkat signifikansi 5% dari *degree of freedom* (df) = $n-2$. Dalam hal ini (n) adalah sampel. Jika r hitung $>$ r tabel maka pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid, demikian sebaliknya.

b. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah alat ukur yang digunakan cukup akurat, stabil, atau konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur. Tujuan dari uji reabilitas ini untuk menilai kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner. Koefisien reliabilitas berkisar antara 0,0 sampai 1,0 semakin kecil reliabilitas maka semakin besar error, koefisien reliabilitas tidak mungkin di atas 1,0 namun tetap dimungkinkan koefisien negatif (-). Menurut Sugiyono, suatu instrumen dinyatakan reliabel bila koefisien reliabilitas minimal 0,70. Menurut pendapat Guilford dan Spearman Brown, instrumen dikatakan reliabel apabila koefisien reliabilitas $>$ 0,60.

Tabel 3.5 Tingkat Realibilitas Berdasarkan Nilai Alpha

Alpha	Tingkat Reabilitas
0,00 s.d 0,20.	Kurang Reliabel
0,20 s.d 0,40.	Agak Relibel
0,40 s.d 0,60.	Cukup Reliabel

0,60 s.d 0,08.	Reliabel
0,08 s.d 1,00.	Sangat Reliabel

Sumber : Sugiyono (2018)

Berdasarkan tabel diatas kriteria penelitian uji reliabilitas adalah: Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikansi 60% atau 0.6 maka kuesioner tersebut reliable.

3.7.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah untuk menguji sejauh mana sebuah regresi disebut model yang baik. Jika model regresi yang baik dapat dilihat dari sudah memenuhi asumsi-asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, linieritas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedasitas dengan SPSS dalam regresi dan perhitungan regresi adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah salah satu bagian dari uji statistik yang berfungsi untuk menentukan apakah suatu populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik uji *Kolmogorof-Smirnov* (Uji K-S) dengan menggunakan taraf signifikan alpha 0.05. Kriteria pengujian apakah data yang disajikan normal apabila nilai signifikansi yang dihasilkan $>0,05$, maka distribusi data dapat dikatakan normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi yang dihasilkan $<0,05$ maka data tidak dapat terdistribusi normal.

b. Uji Multikoleniartias

Uji. Multikolinieritas digunakan untuk melihat apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Dalam model regresi sebaiknya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas, atau tidak terjadi multikolinearitas. Kriteria pengujian multikolinieritas dengan melihat dari

tollerance dan VIF. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *Value Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Apabila nilai VIF > 10 dan nilai *tolerance* $< 0,10$ maka terjadi multikolinearitas. Dan apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedestisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah ada atau tidak ada heterokedastisitas yaitu salah satunya dengan menggunakan uji gletsjer, yaitu dengan melakukan regresi antara nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen model regresi yang diajukan. Apabila variabel independen signifikan secara statistic mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. Cara mendeteksinya adalah bila hasil perhitungan dari masing-masing variabel menunjukkan level sig $> \alpha > 0,05$ maka penelitian tersebut bebas dari heterokedastisitas. Dan sebaliknya bila level sig $< \alpha < 0,05$ maka penelitian tersebut tidak bebas heterokedastisitas.

3.7.4. Uji Statistik

a. Uji Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, yaitu regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Analisis ini disebut berganda karena banyaknya faktor variabel yang akan mungkin mempengaruhi variabel tak bebas. Maka untuk mengetahui pengaruh antara Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dan

Pengawasan Keuangan Daerah (X_2) Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Di Kota Medan, maka dilakukan analisis statistik regresi linear berganda. Adapun rumusan regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

$$Y_1 = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

a = Pengetahuan

X_1 = Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah

X_2 = Internal Audit

Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah

b_1, b_2 = Koefisien regresi untuk X_1, X_2

ε = Standard eror

3.7.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh secara simultan antara variabel bebas (X_1, X_2) terhadap variabel tak bebas (Y). Metode pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan pengujian koefisien determinasi (R^2), uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji F).

a. Uji Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinan dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat dengan adanya regresi linear berganda. Nilai koefisien determinan majmuk berkisar antara 0 hingga 1. Jika R^2 yang diperoleh mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan jika R^2 yang diperoleh mendekati 0, maka

dapat dikatakan semakin kecil pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat.

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji t pada dasarnya melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam memengaruhi variasi variabel dependen. Uji parsial dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan dari variabel penelitian yang akan diuji pengaruhnya terhadap variabel Y secara terpisah atau individu dengan melihat pada nilai Sig (*value*) atau membandingkan t-hitung dengan t-tabel.

Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai Sig. $t < \alpha = 0.05$ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai Sig. $t > \alpha = 0.05$ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Simultan (F)

Uji F disebut juga dengan uji ANOVA, yaitu *Analysis of Variance*. Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F berdasarkan nilai Fhitung dan Ftabel adalah:

- 1) Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji F berdasarkan nilai signifikansi, adalah:

- 1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Pada Kota Medan

Pada zaman dahulu Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling/Sei Kera. Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan–Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer.

Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) sampai ke Sungai Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai tersebut. Secara keseluruhan jenis tanah di wilayah Deli terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran, tanah hitam, tanah coklat dan tanah merah. Hal ini merupakan penelitian dari Van Hissink tahun 1900 yang dilanjutkan oleh penelitian Vriens tahun 1910 bahwa disamping jenis tanah seperti tadi ada lagi ditemui jenis tanah liat yang spesifik. Tanah liat inilah pada waktu penjajahan Belanda ditempat yang bernama Bakaran Batu (sekarang Medan Tenggara atau Menteng) orang membakar batu bata yang berkualitas tinggi dan salah satu pabrik

batu bata pada zaman itu adalah Deli Klei. Mengenai curah hujan di Tanah Deli digolongkan dua macam yakni : Maksima Utama dan Maksima Tambahan. Maksima Utama terjadi pada bulan-bulan Oktober s/d bulan Desember sedang Maksima Tambahan antara bulan Januari s/d September. Secara rinci curah hujan di Medan rata-rata 2000 pertahun dengan intensitas rata-rata 4,4 mm/jam.

Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan disana sini terutama dimuara-muara sungai diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi Kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara.

b. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif

2. Misi

a. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat

b. Medan Maju

Memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua

c. Medan Bersih

Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata

d. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM

e. Medan Kondusif

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat

f. Medan Inovatif

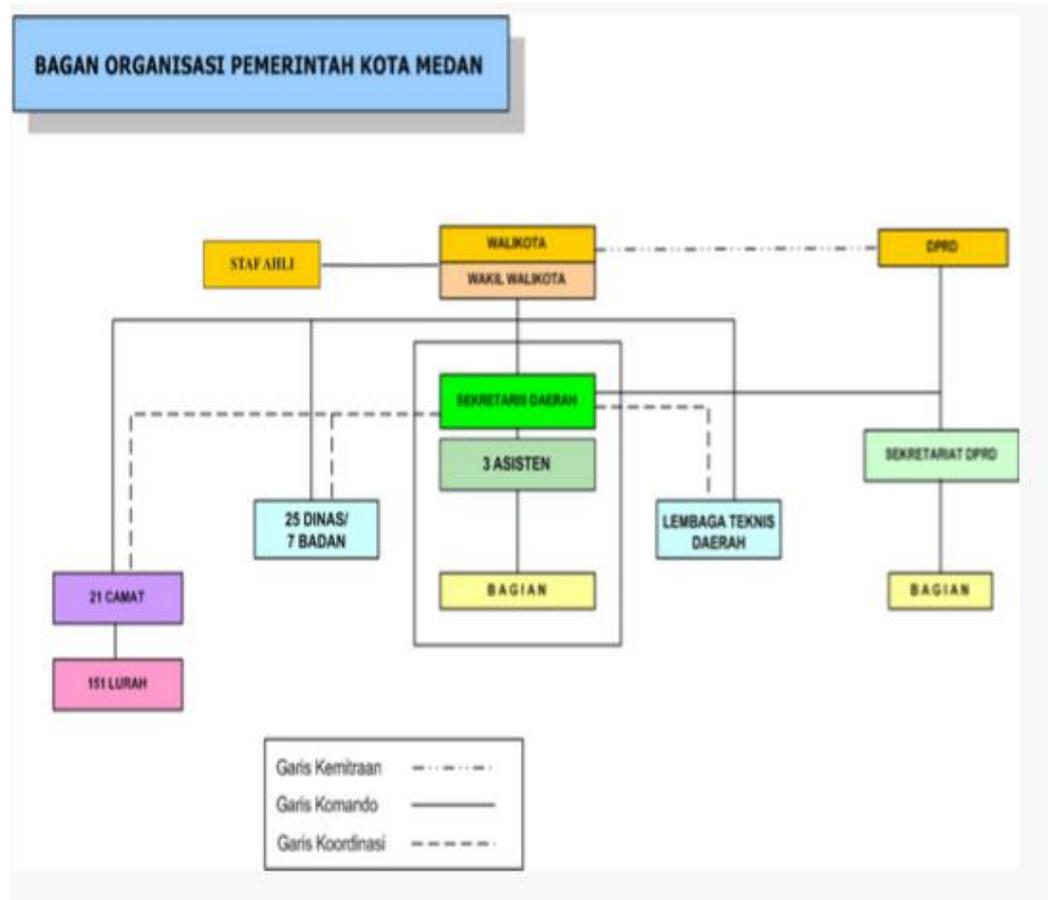
Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital sosial budaya

g. Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air

c. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Medan



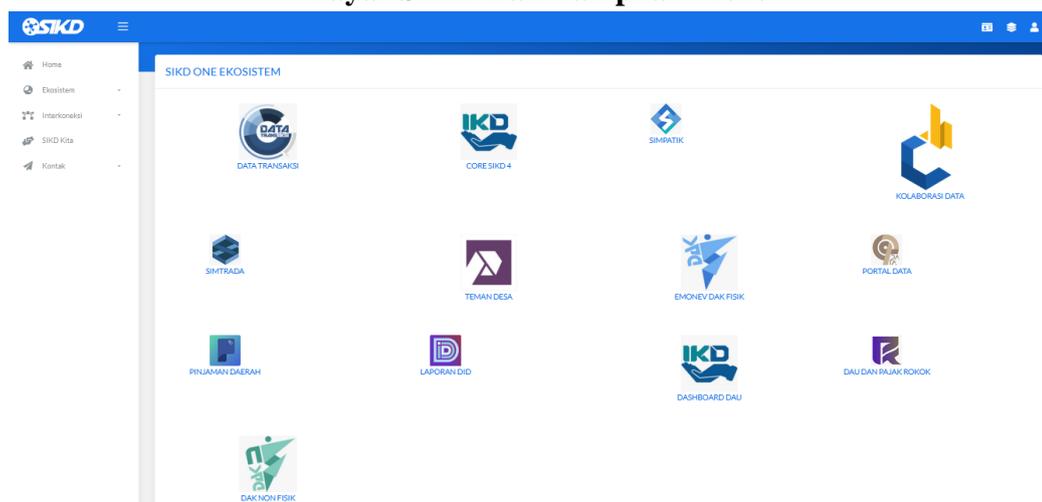
Sumber: *Portalpemkomedan.go.id*

Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Pasal 1 ayat 3, PMK 74 PMK.07 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah) SIKD telah

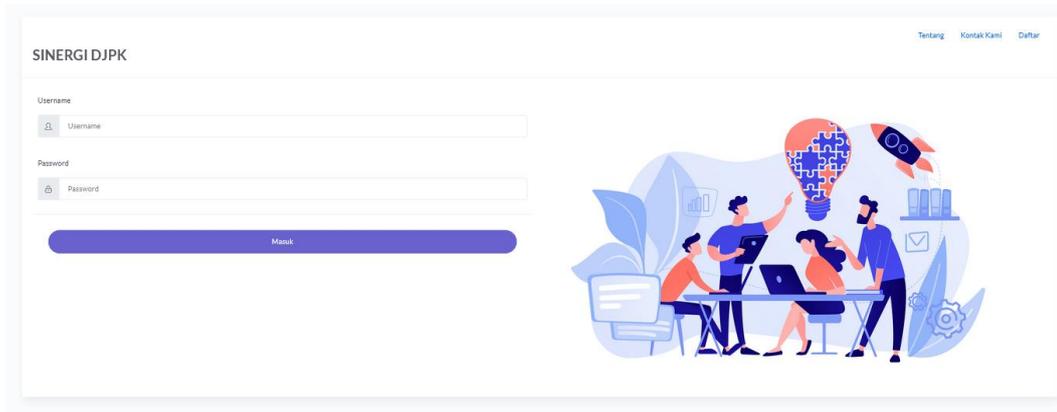
disebutkan secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai bagian dari penerapan SIKD, telah diberlakukan berbagai peraturan sekunder seperti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Perubahan kebijakan yang pesat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengharuskan perubahan standar akuntansi dari kas menjadi berbasis akrual dan menambahkan pelaporan keuangan berbasis akrual. Kebutuhan akan ketersediaan data bahkan dengan kelambatan pelaporan yang lama. Dengan kata lain, program pengembangan dan transformasi SIKD telah dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2015.

Gambar 4.2
Layar SIKD Dan Tampilan Menu



Sumber : Sikd.Kemenkeu.go.id



Sumber : *Sikd.Kemenkeu.go.id*

Internal Audit memeriksa dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional, keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, dan kegiatan lainnya. Auditor internal pemerintah memiliki peran untuk melakukan pengendalian internal (untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai) dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tanggung jawab utama auditor internal pemerintah adalah melakukan audit yang independen dan obyektif terhadap operasi dan kegiatan pemerintah, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Peran internal audit sendiri, berdasarkan definisi dari *Institute of Internal Auditors* adalah sebagai suatu aktivitas asuransi dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Sedangkan fungsi internal audit setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga), yaitu: (1) Menentukan apakah *internal control* perusahaan sudah baik atau belum; (2) Menentukan keandalan informasi yang telah dibuat oleh pihak manajemen; dan (3) Menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi atas berbagai kegiatan operasional organisasi (Dompas, 2020).

Peraturan Walikota Medan Nomor 20 tahun 2020 tentang rincian tugas dan fungsi inspektorat kota medan menyebutkan bahwa inspektorat merupakan unsur

pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Inspektur, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi inspektorat Kota Medan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 20 tahun 2020 terdiri atas :

a. inspektorat;

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Inspektur, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah

b. sekretariat,

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Inspektur, sekretariat membawahkan :

1. sub bagian perencanaan;
2. sub bagian analisis dan evaluasi; dan
3. sub bagian administrasi dan umum.

c. inspektur pembantu I,

Inspektur Pembantu I dipimpin oleh Inspektur Pembantu I, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris. Inspektur pembantu I membawahkan:

1. jabatan fungsional auditor; dan
2. jabatan fungsional pengawas pemerintahan.

d. inspektur pembantu II,

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan lingkup wilayah II, inspektur pembantu II membawahkan:

1. jabatan fungsional auditor; dan
2. jabatan fungsional pengawas pemerintahan.

e. inspektur pembantu III,

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan lingkup wilayah II, inspektur pembantu III membawahkan:

1. jabatan fungsional auditor; dan
2. jabatan fungsional pengawas pemerintahan.

f. inspektur pembantu IV,

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan lingkup wilayah IV inspektur pembantu IV membawahkan:

1. jabatan fungsional auditor; dan
2. jabatan fungsional pengawas pemerintahan.

g. inspektur pembantu V,

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan lingkup wilayah V, inspektur pembantu V membawahkan:

1. jabatan fungsional auditor; dan
2. jabatan fungsional pengawas pemerintahan.

h. kelompok jabatan fungsional lainnya dan pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

4.1.2. Deskripsi Karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan data primer dari 60 orang untuk mengetahui bagaimana responden menjawab kuesioner pernyataan yang diberikan di 5 Kantor Dinas yang ada di Kota Medan yang telah penulis pilih. Kuesioner tersebut mengamati pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan terakhir merupakan beberapa karakteristik responden tersebut.

Karakteristik responden yang diperoleh berdasarkan kuesioner yang di sebar adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		
	Frequency	Percent
Laki-laki	27	45
Perempuan	33	55
Total	60	100.0

Sumber: Diolah penulis 2024

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 27 orang dengan dengan persentase sebesar 45%, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 33 orang

dengan hasil persentase 55%. Analisis dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah perempuan.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

	Usia	
	Frequency	Percent
25 - 30 Tahun	19	32
31 – 45 Tahun	27	45
46 – 50 Tahun	14	23
Total	60	100

Sumber: Diolah penulis 2024

Dari tabel 4.2 diatas dapat di ketahui bahwa responden yang berusia 25 – 30 tahun sebanyak 19 orang dengan persentase 32% usia 31-45 tahun sebanyak 27 orang dengan persentase sebesar 45%, dan pada usia 46-50 tahun sebanyak 14 orang dengan hasil persentase 23%. Mayoritas dari usia sampel pada penelitian ini adalah pada rentang usia 31-45 tahun.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

	Usia	
	Frequency	Percent
SMA/SMK	14	23
D3	12	20
S1	25	42
S2	9	15
Total	60	100

Sumber: Diolah penulis 2024

Dari tabel 4.3 di atas bisa dilihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 14 orang dengan hasil persentase 23%, pegawai dengan latar belakang pendidikan D3 sebanyak 12 orang dengan hasil persentase

20%, pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 25 orang dengan hasil persentase 42% dan pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 9 orang dengan hasil persentase 15%. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas tingkat pendidikan terbanyak adalah dengan latar belakang pendidikan S1.

4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengolah data tabulasi dari kuesioner dalam bentuk data terdiri dari 19 (sembilan belas) pernyataan dengan keterangan lima pernyataan untuk variabel X_1 (pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah), lima pernyataan untuk variabel X_2 (peran internal audit) dan sembilan pernyataan dengan variabel Y (kualitas laporan keuangan).

Kualitas Laporan Keuangan yang diberikan berdasarkan variabel harus di isi oleh 60 orang responden. Jawaban angket disediakan dalam 5 alternatif jawaban yaitu

- a. SS = Sangat setuju dengan skor 5
- b. S = Setuju dengan skor 4
- c. KS = Kurang Setuju dengan skor 3
- d. TS = Tidak setuju dengan skor 2
- e. STS = Sangat tidak setuju dengan skor 1

Dibawah ini akan dilampirkan persentase jawaban dari setiap pernyataan yang telah di sebarakan kepada responden:

a. Variabel Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X₁)

Tabel 4.4 Jawaban Responden Tentang Saya mengerti instruksi atau petunjuk yang jelas dalam menggunakan sistem informasi akuntansi yang ada

X_{1.1}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	17	28,3	28,3	28,3
setuju	27	45,0	45,0	73,3
sangat setuju	16	26,7	26,7	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel 4.4 di atas bahwa yang menyatakan kurang setuju sebanyak 17 responden dengan persentase 28,3%, setuju 27 responden dengan 45% dan sangat setuju 16 responden dengan 26,7% jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa responden setuju dengan Saya mengerti instruksi atau petunjuk yang jelas dalam menggunakan sistem informasi akuntansi yang ada.

Tabel 4.5 Jawaban Responden Tentang Saya dapat mengoperasikan Sistem informasi akuntansi pada waktu jam kerja dengan nyaman tanpa kendala

X_{1.2}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	4	6,7	6,7	6,7
tidak setuju	13	21,7	21,7	28,3
kurang setuju	10	16,7	16,7	45,0
setuju	28	46,7	46,7	91,7
sangat setuju	5	8,3	8,3	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa responden menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 4 orang dengan hasil persentase 6.7%, responden menyatakan tidak setuju sebanyak 13 orang dengan hasil persentase 21.7%, responden menyatakan Kurang Setuju sebanyak 10 orang dengan hasil persentase 16.7%, responden menyatakan setuju sebanyak 28 orang dengan hasil persentase 46.7% dan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang dengan hasil persentase 8.3%. Dari hasil di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa responden setuju Saya dapat mengoperasikan Sistem informasi akuntansi pada waktu jam kerja dengan nyaman tanpa kendala.

Tabel 4.6 Jawaban Responden Tentang Saya dapat memahami masalah kebutuhan sistem informasi akuntansi

X_{1.3}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	22	36,7	36,7	36,7
setuju	32	53,3	53,3	90,0
sangat setuju	6	10,0	10,0	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa yang menyatakan Kurang Setuju sebanyak 22 orang dengan hasil persentase 36.7%, responden menyatakan setuju sebanyak 32 orang dengan hasil persentase 53.3% dan responden menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang dengan hasil persentase 10%. Dari hasil data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa responden menyatakan setuju dengan Saya dapat memahami masalah kebutuhan sistem informasi akuntansi.

Tabel 4.7 Jawaban Responden Tentang Sistem informasi akuntansi yang digunakan dapat memberikan kemudahan untuk mencari informasi yang dibutuhkan

X_{1.4}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	10	16,7	16,7	16,7
kurang setuju	20	33,3	33,3	50,0
setuju	25	41,7	41,7	91,7
sangat setuju	5	8,3	8,3	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel 4.7 di atas dapat di lihat bahwa yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 orang dengan hasil persentase 16.7%, responden menyatakan Kurang Setuju sebanyak 20 orang dengan hasil persentase 33.3%, responden menyatakan setuju sebanyak 25 orang dengan hasil persentase sebanyak 41.7% dan responden menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang dengan hasil persentase 8.3%. Dari hasil perhitungan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa responden menyatakan setuju dengan Sistem informasi akuntansi yang digunakan dapat memberikan kemudahan untuk mencari informasi yang dibutuhkan

Tabel 4.8 Jawaban Responden Tentang Sistem informasi akuntansi di perusahaan dapat menjamin data pada saat data disimpan

X_{1.5}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	23	38,3	38,3	38,3
setuju	31	51,7	51,7	90,0
sangat setuju	6	10,0	10,0	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa responden menyatakan Kurang Setuju sebanyak 23 orang dengan hasil persentase 38.3%, responden menyatakan setuju sebanyak 31 orang dengan hasil persentase 51.7% dan responden menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang dengan hasil persentase 10%. Dari hasil diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa responden menyatakan sangat setuju dengan Sistem informasi akuntansi di perusahaan dapat menjamin data pada saat data disimpan.

b. Variabel Peran Internal Audit (X2)

Tabel 4.9 Jawaban Responden Tentang Auditor internal melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh X_{2.1}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	2	3,3	3,3	3,3
kurang setuju	17	28,3	28,3	31,7
setuju	27	45,0	45,0	76,7
sangat setuju	14	23,3	23,3	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa responden mengatakan tidak setuju sebanyak 2 orang dengan hasil persentase 3.3%, responden menyatakan Kurang Setuju sebanyak 17 orang dengan hasil persentase sebanyak 28.3%, responden menyatakan setuju sebanyak 27 orang dengan hasil persentase 45% dan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 14 orang dengan hasil persentase 23.3%. Dari tabel di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju terhadap Auditor internal melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh.

Tabel 4.10 Jawaban Responden Tentang Auditor internal menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas

X_{2.2}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	1	1,7	1,7	1,7
tidak setuju	6	10,0	10,0	11,7
kurang setuju	14	23,3	23,3	35,0
setuju	22	36,7	36,7	71,7
sangat setuju	17	28,3	28,3	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel 4.10 diatas dapat di lihat bahwa responden menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang dengan hasil persentase 1.7%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6 orang dengan hasil persentase 10%, responden menyatakan Kurang Setuju sebanyak 14 orang dengan hasil persentase 23.3%, responden menyatakan setuju sebanyak 22 orang dengan hasil persentase 36.7%, responden menyatakan sangat setuju sebanyak 17 orang dengan hasil persentase sebanyak 28.3%. Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa respon menyatakan setuju terhadap Auditor internal menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.

Tabel 4.11 Jawaban Responden Tentang Auditor internal mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan dapat mengubah pelaporan kegiatan kegiatan yang diaudit

X_{2.3}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	2	3,3	3,3	3,3

tidak setuju	6	10,0	10,0	13,3
kurang setuju	13	21,7	21,7	35,0
setuju	26	43,3	43,3	78,3
sangat setuju	13	21,7	21,7	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa responden menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang dengan hasil persentase 3.3%, responden menyatakan tidak setuju sebanyak 6 orang dengan hasil persentase 10%, responden menyatakan Kurang Setuju sebanyak 13 orang dengan hasil persentase 21.7%, responden menyatakan setuju sebanyak 26 orang dengan hasil persentase 43.3%, dan menyatakan sangat setuju sebanyak 13 responden dengan persentase 21.7%. Responden menyatakan Kurang Setuju terhadap Auditor internal mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan dapat mengubah pelaporan kegiatan kegiatan yang diaudit.

Tabel 4.12 Jawaban Responden Tentang Auditor internal tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi

X_{2.4}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	3	5,0	5,0	5,0
kurang setuju	17	28,3	28,3	33,3
setuju	22	36,7	36,7	70,0
sangat setuju	18	30,0	30,0	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari hasil tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa responden menyatakan tidak setuju sebanyak 3 orang dengan hasil persentase 5%, responden menyatakan Kurang Setuju sebanyak 17 orang dengan hasil persentase 28.3%, responden

menyatakan setuju sebanyak 22 orang dengan hasil persentase 36.7% dan responden menyatakan sangat setuju sebanyak 18 orang dengan hasil persentase 30%. Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa responden menyatakan setuju terhadap Auditor internal tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi.

Tabel 4.13 Jawaban Responden Tentang Auditor internal melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit

X_{2.5}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	6	10,0	10,0	10,0
kurang setuju	20	33,3	33,3	43,3
setuju	23	38,3	38,3	81,7
sangat setuju	11	18,3	18,3	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari hasil tabel 4.13 diatas dapat di lihat bahwa responden menyatakan tidak setuju sebanyak 6 orang dengan hasil persentase 10%, responden menyatakan Kurang Setuju sebanyak 20 orang dengan hasil persentase 33.3%, responden menyatakan setuju sebanyak 23 orang dengan hasil persentase 38.3% dan responden menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang dengan hasil persentase 18.3%. Dari tabel diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa responden menyatakan setuju terhadap Auditor internal melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit.

c. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Tabel 4.14 Jawaban Responden Tentang Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja memberikan informasi yang dapat mengoreksi ekspektasi masa lalu

Y.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	2	3,3	3,3	3,3
Kurang setuju	17	28,3	28,3	31,7
Setuju	27	45,0	45,0	76,7
Sangat Setuju	14	23,3	23,3	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel 4.14 diatas dapat di lihat bahwa responden menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang dengan hasil persentase 3.3%, responden menyatakan Kurang Setuju sebanyak 17 orang dengan hasil persentase 28.3%, responden menyatakan setuju sebanyak 27 orang dengan hasil persentase 45% dan responden menyatakan sangat setuju sebanyak 14 orang dengan hasil persentase 23.3%. Dari tabel diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa responden menyatakan setuju terhadap Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja memberikan informasi yang dapat mengoreksi ekspektasi masa lalu.

Tabel 4.15 Jawaban Responden Tentang Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu

Y.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	1	1,7	1,7	1,7
Tidak Setuju	6	10,0	10,0	11,7
Kurang setuju	14	23,3	23,3	35,0

Setuju	22	36,7	36,7	71,7
Sangat Setuju	17	28,3	28,3	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel 4.15 diatas dapat di lihat bahwa responden menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang dengan hasil persentase 1.7%, responden menyatakan tidak setuju sebanyak 6 orang dengan hasil persentase 10%, responden menyatakan Kurang Setuju sebanyak 14 orang dengan hasil persentase 23.3%, responden menyatakan setuju sebanyak 22 orang dengan hasil persentase 36.7% dan responden menyatakan sangat setuju sebanyak 17 orang dengan hasil persentase 28.3%. Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa responden menyatakan Setuju tentang Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu.

Tabel 4.16 Jawaban Responden Tentang Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap

Y.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	2	3,3	3,3	3,3
Tidak Setuju	6	10,0	10,0	13,3
Kurang setuju	13	21,7	21,7	35,0
Setuju	26	43,3	43,3	78,3
Sangat Setuju	13	21,7	21,7	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa responden menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang dengan hasil persentase 3.3%, responden menyatakan tidak setuju sebanyak 6 orang dengan hasil persentase 10.0%, responden menyatakan Kurang Setuju sebanyak 13 orang dengan hasil persentase 21.7%, responden menyatakan setuju sebanyak 26 orang dengan hasil persentase 43.3% dan responden menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang dengan hasil persentase 21.7%.

menyatakan Kurang Setuju sebanyak 13 orang dengan hasil persentase 21.7%, responden menyatakan setuju sebanyak 26 orang dengan hasil persentase 43.3% dan responden menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang dengan hasil persentase 21.7%. Dari hasil diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa responden menyatakan setuju tentang Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap.

Tabel 4.17 Jawaban Responden Tentang Transaksi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.

Y.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	3	5,0	5,0	5,0
Kurang setuju	17	28,3	28,3	33,3
Setuju	22	36,7	36,7	70,0
Sangat Setuju	18	30,0	30,0	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa responden menyatakan tidak setuju sebanyak 3 orang dengan hasil persentase 5%, responden menyatakan Kurang Setuju sebanyak 17 orang dengan hasil persentase 28.3%, responden menyatakan setuju sebanyak 22 orang dengan hasil persentase 36.7% dan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 18 orang dengan hasil persentase 30%. Dari hasil diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa responden menyatakan setuju dengan Transaksi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.

Tabel 4.18 Jawaban Responden Tentang Informasi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja bebas dari kesalahan yang bersifat material.

Y.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	6	10,0	10,0	10,0
Kurang setuju	20	33,3	33,3	43,3
Setuju	23	38,3	38,3	81,7
Sangat Setuju	11	18,3	18,3	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel 4.18 di atas dapat dilihat bahwa responden menyatakan tidak setuju sebanyak 6 orang dengan hasil persentase 10%, responden menyatakan Kurang Setuju sebanyak 20 orang dengan hasil persentase 33.3%, responden menyatakan setuju sebanyak 23 orang dengan hasil persentase 38.3% dan responden menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang dengan hasil persentase 18.3%. Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa responden menyatakan setuju Informasi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja bebas dari kesalahan yang bersifat material.

Tabel 4.19 Jawaban Responden Tentang Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus

Y.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang setuju	10	16,7	16,7	16,7
Setuju	30	50,0	50,0	66,7
Sangat Setuju	20	33,3	33,3	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel 4.19 di atas dapat di lihat bahwa responden menyatakan Kurang Setuju sebanyak 10 orang dengan hasil persentase 16.7%, responden menyatakan setuju sebanyak 30 orang dengan hasil persentase 50% dan responden menyatakan sangat setuju sebanyak 20 orang dengan hasil persentase 20%. Dari hasil tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa responden menyatakan setuju tentang Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus.

Tabel 4.20 Jawaban Responden Tentang Ditempat saya bekerja, informasi keuangan yang dihasilkan dapat diuji

Y.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	6	10,0	10,0	10,0
Tidak Setuju	3	5,0	5,0	15,0
Kurang setuju	8	13,3	13,3	28,3
Setuju	31	51,7	51,7	80,0
Sangat Setuju	12	20,0	20,0	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel 4.20 di atas dapat di lihat bahwa responden menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 6 responden dengan hasil persentase 10%, tidak setuju 3 responden dengan persentase 5%, kurang Setuju sebanyak 8 orang dengan hasil persentase 13.3%, responden menyatakan setuju sebanyak 31 orang dengan hasil persentase 51.7% dan responden menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang dengan hasil persentase 20%. Dari hasil tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa responden menyatakan setuju tentang Ditempat saya bekerja, informasi keuangan yang dihasilkan dapat diuji.

Tabel 4.21 Jawaban Responden Tentang Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya

Butir 8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	2	3,3	3,3	3,3
Kurang setuju	12	20,0	20,0	23,3
Setuju	29	48,3	48,3	71,7
Sangat Setuju	17	28,3	28,3	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel 4.21 di atas dapat di lihat bahwa responden menyatakan tidak setuju 2 responden dengan persentase 3.3%, kurang Setuju sebanyak 12 orang dengan hasil persentase 20%, responden menyatakan setuju sebanyak 29 orang dengan hasil persentase 48.3% dan responden menyatakan sangat setuju sebanyak 17 orang dengan hasil persentase 28.3%. Dari hasil tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa responden menyatakan setuju tentang Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

Tabel 4.22 Jawaban Responden Tentang Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dipahami oleh pengguna

Y.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	4	6,7	6,7	6,7
Kurang setuju	10	16,7	16,7	23,3
Setuju	31	51,7	51,7	75,0
Sangat Setuju	15	25,0	25,0	100,0
Total	60	100,0	100,0	

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel 4.22 di atas dapat di lihat bahwa responden menyatakan tidak setuju 4 responden dengan persentase 6.7%, kurang Setuju sebanyak 10 orang dengan hasil persentase 16.7%, responden menyatakan setuju sebanyak 31 orang dengan hasil persentase 51.7% dan responden menyatakan sangat setuju sebanyak 15 orang dengan hasil persentase 25%. Dari hasil tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa responden menyatakan setuju tentang Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dipahami oleh pengguna.

4.1.4. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas (Ke-absahan)

Uji validitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk menunjukkan keabsahan suatu instrumen. Oleh karena itu, pengujian validitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen memenuhi fungsinya. Untuk mengetahui relevansi data dalam daftar pernyataan (kuesioner) yang akan diberikan kepada responden, perlu dilakukan pengecekan validitas setiap pernyataan lebih besar dari $>0,30$ sehingga faktor-faktor dalam pernyataan itu dianggap valid dan sesuai. untuk penelitian. . Uji validitas selengkapnya dapat dilihat di bawah ini:

- 1) Hasil Uji Validitas Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
(X₁)

Adapun hasil uji validitas untuk variabel Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 4.23 Hasil Uji Validitas Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X _{1.1}	14,1500	7,181	,754	,815
X _{1.2}	14,8500	5,587	,756	,826
X _{1.3}	14,4000	7,769	,732	,827
X _{1.4}	14,7167	7,190	,604	,852
X _{1.5}	14,4167	7,908	,679	,838

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel 4.23 di atas dapat hasil output SPSS untuk uji validitas pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X₁) pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* dimana nilai korelasi antara nilai skor setiap data dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil dari ke 5 data pernyataan pada variabel Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dinyatakan valid karena nilai koefisien lebih dari 0,30.

2. Hasil Uji Peran Internal Audit (X₂)

Hasil uji validitas untuk variabel Peran Internal Audit sebagai berikut:

Tabel 4.24 Hasil Uji Validitas Peran Internal Audit

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X _{2.1}	15,0667	9,995	,769	,839
X _{2.2}	15,1500	9,926	,557	,889
X _{2.3}	15,2500	9,140	,699	,854
X _{2.4}	15,0333	9,185	,851	,817
X _{2.5}	15,3000	9,773	,708	,850

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel 4.24 di atas dapat di lihat bahwa faktor uji validitas Peran Internal Audit (X_2) pada pengujian ini telah memenuhi syarat dengan nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih dari 0,30. Sehingga dapat di simpulkan pada pernyataan ini dikatakan valid.

3. Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Adapun hasil uji validitas untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.25 Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	30,8667	20,626	,654	,764
Y.2	30,9500	21,675	,351	,803
Y.3	31,0500	20,014	,540	,776
Y.4	30,8333	20,141	,642	,762
Y.5	31,1000	20,600	,570	,772
Y.6	30,5833	23,298	,340	,799
Y.7	31,0833	20,145	,439	,794
Y.8	30,7333	22,097	,448	,788
Y.9	30,8000	21,281	,532	,778

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Dari tabel 4.25 diatas dapat dilihat bahwa uji validitas Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada pengujian ini telah memenuhi syarat dengan nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari 0.30, sehingga dapat di simpulkan pada pernyataan ini dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menentukan konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika dilakukan pengukuran berulang kali. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik dan reliabel

apabila mempunyai nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel statistik reliabilitas di bawah ini:

- 1) Hasil Uji Reliabilitas Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_1)

Adapun hasil uji reliabilitas variabel Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26 Hasil Uji Reliabilitas Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,861	5

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Berdasarkan tabel 4.25 diatas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0.861 > 0.60$ maka data tersebut dapat dikatakan reliabel (handal).

- 2) Hasil Uji Reliabilitas Peran Internal Audit (X_2)

Adapun hasil uji reliabilitas variabel Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.27 Hasil Uji Reliabilitas Peran Internal Audit

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,877	5

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Berdasarkan tabel 4.27 diatas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0.877 > 0.60$ maka data tersebut dapat dikatakan reliabel (handal).

3) Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Adapun hasil uji reliabilitas variabel Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.28 Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,801	9

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Berdasarkan tabel 4.28 diatas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0.801 > 0.60$ maka data tersebut dapat dikatakan reliabel (handal).

4) Hasil Uji Reliabilitas Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, Peran Internal Audit dan Kualitas Laporan Keuangan

Tabel 4.29 Hasil Uji Reliabilitas Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, Peran Internal Audit dan Kualitas Laporan Keuangan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,772	3

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Berdasarkan tabel 4.29 diatas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0.772 > 0.60$ maka data tersebut dapat dikatakan reliabel (handal).

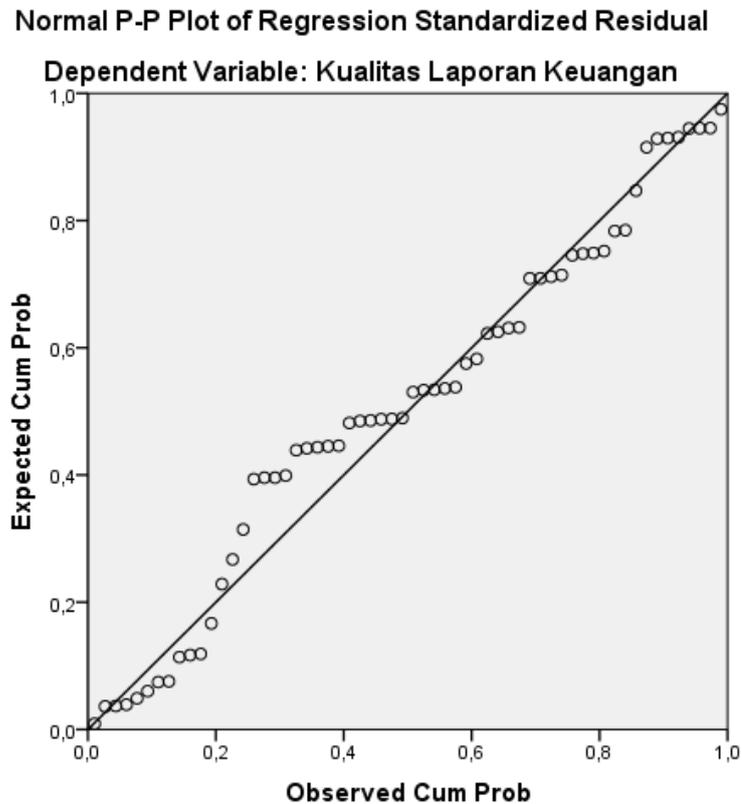
4.1.5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian untuk melihat sebaran sekelompok data atau variabel. Asumsi ini harus dipenuhi agar regresi linier baik, pengujian normalitas dilakukan terhadap nilai sisa model. Berikut hasil pengujian SPSS

Statistic 23 dengan menggunakan analisis grafis. Hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

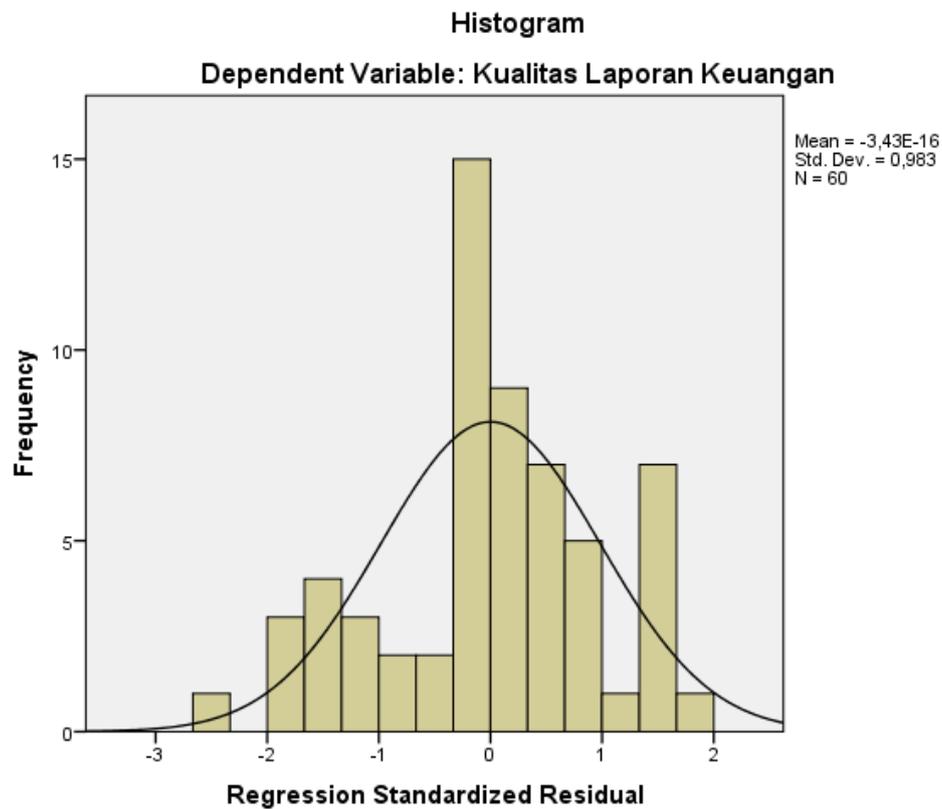
Gambar 4.3 PP-Plot Uji Normalitas



Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, grafik menunjukkan konveksitas seimbang di bagian tengah dan titik-titik PP-Plot berada di antara garis-garis grafik, sehingga data dinyatakan normal.

Gambar 4.4 Histogram Uji Normalitas



Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Plot histogram normal digunakan untuk melihat hasil uji normalitas. Gambar di atas sesuai dengan uji normalitas yang menyatakan bahwa suatu data dikatakan normal jika garisnya berbentuk lonceng dan terletak di tengah-tengah maka berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Ketentuan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah:

jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih besar dari 10 (atau kurang dari 10) dan nilai toleransi tidak kurang dari 0,1 (di atas 0,1), maka dapat

dikatakan bebas multikolinieritas $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$. Semakin tinggi VIF, semakin rendah toleransinya.

Tabel 4.30 Hasil Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah	,900	1.111
	Peran Internal Audit	,900	1.111

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

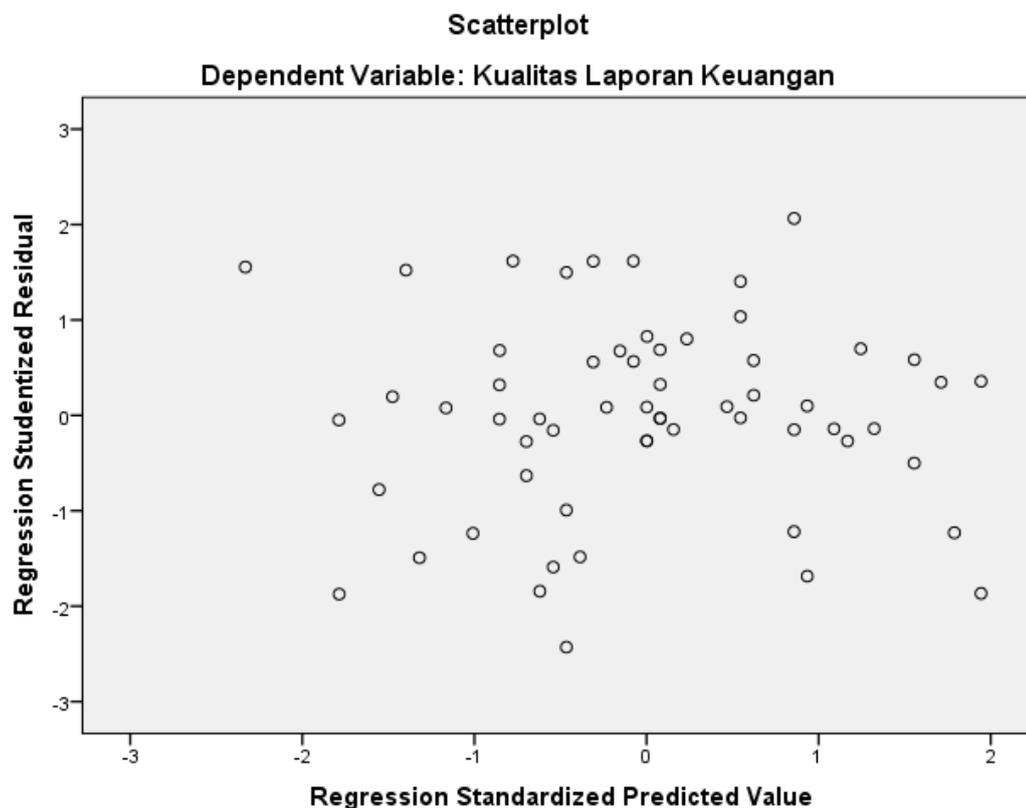
Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Berdasarkan tabel 4.30 di atas dapat diketahui bahwa hasil uji multikolinieritas untuk variabel Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan $VIF < 10$ maka penelitian ini dinyatakan terbebas dari masalah multikolinieritas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk memeriksa apakah terdapat ketimpangan varians antara residu observasi yang satu dengan observasi yang lain pada model regresi, sedangkan model regresi yang baik tidak mengalami heteroskedastisitas, salah dan tidak konsisten.

Gambar 4.5 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas



Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Gambar *scatterplot* menampilkan titik-titik yang dihasilkan terdistribusi secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Kemudian distribusi data berpusat disekitar nol yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas yang mana variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah homoskedastisitas.

4.1.6. Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen serta memprediksi variabel

dependen dengan menggunakan dua atau lebih variabel dependen. Adapun rumus regresi linear berganda yakni :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Tabel 4.31 Hasil Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,911	2,440		4,062	,000
	Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah	,331	,119	,212	2,767	,008
	Peran Internal Audit	,994	,103	,743	9,680	,000

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Berdasarkan tabel hasil diatas maka diperoleh regresi linear berganda sebagai berikut $Y = 9,911 + 0,331 + 0,994 X_2 + e$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka nilai Kualitas Laporan Keuangan (Y) adalah sebesar 9,911.
- Jika terjadi peningkatan Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebesar 1, maka Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,331.
- Jika terjadi peningkatan Peran Internal Audit sebesar 1, maka Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,994.

4.1.7. Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

a. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji Parsial (Uji t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas secara individual menerangkan variasi pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 4.32 Uji Parsial

Coefficients^a

Model	T	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
(Constant)	4,062	,000		
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah	2,767	,008	,900	1,111
Peran Internal Audit	9,680	,000	,900	1,111

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Berdasarkan tabel 4.32 maka dapat dilihat bahwa:

a. Pengaruh Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara parsial adalah:

Ha diterima dan H0 ditolak, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig. t < \alpha$ Ha ditolak dan H0 diterima, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig. t > \alpha$ t_{hitung} sebesar 2.767 sedangkan t_{tabel} sebesar 1.111 dan signifikan sebesar (sig) 0,008, sehingga $t_{hitung} 2.767 > 1,111 t_{tabel}$ dan signifikan $0,008 < 0,05$, maka Ha diterima dan H0 ditolak, yang menyatakan secara parsial

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

- b. Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara parsial adalah:

Ha diterima dan H0 ditolak, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig. t < \alpha$ Ha ditolak dan H0 diterima, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig. t > \alpha$ t_{hitung} sebesar 9,680 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,111 dan signifikan sebesar (sig) 0,000, sehingga $t_{hitung} 9,680 > 1,111 t_{tabel}$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka Ha diterima dan H0 ditolak, yang menyatakan secara parsial Peran Internal Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) memperlihatkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Cara yang digunakan adalah dengan melihat *level of significant* ($=0,05$). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.

Tabel 4.33 Uji Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1072,207	2	536,103	65,710	,000 ^b
	Residual	465,043	57	8,159		
	Total	1537,250	59			

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Berdasarkan tabel 4.33 di atas dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 65.710 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,16 yang dapat dilihat pada $\alpha = 0,05$. Probabilitas signifikan

jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan Peran Internal Audit secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sehingga hipotesis sebelumnya adalah Terima H_a (tolak H_0) atau hipotesis diterima.

4.1.8. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Tabel 4.34 Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.835 ^a	.697		.687	2,85634

a. Predictors: (Constant), Peran Internal Audit, Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah,
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: olah data dengan SPSS 2024

Berdasarkan tabel 4.34 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R) sebesar 0,697 dimana ini menunjukkan bahwa variabel Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki hubungan yang cukup erat. Hasil tabel diatas juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,697 dan nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjust R Square*) adalah 0,687. Hal ini berarti sebanyak 68.7% variasi dari Kualitas Laporan Keuangan mampu dijelaskan oleh variabel Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan Peran Internal Audit. Sedangkan sisanya (100% -

68.7% = 31,3%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk kedalam penelitian ini

4.2. Pembahasan

Berikut adalah hasil pembahasan mengenai Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_1) dan Peran Internal Audit (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) :

a. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_1) Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Hasil analisis menunjukkan bahwa hasil perhitungan Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Meilani Purwanti (2014) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah berdampak terhadap kualitas pelaporan keuangan dan penelitian ini sesuai dengan klaim bahwa penggunaan sistem akuntansi daerah sistem akuntansi keuangan berdampak pada kualitas pelaporan keuangan. Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penggunaan sistem informasi akuntansi mempengaruhi kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi akuntansi dalam suatu instansi dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin rendah pemanfaatan sistem informasi akuntansi pada suatu instansi maka semakin buruk pula kualitas pelaporan keuangan

pemerintah daerah. Maka upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat dan pelaporan keuangan yang berkualitas adalah dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi untuk mendukung operasional pemerintah. Melalui penggunaan sistem yang terintegrasi pada instansi pemerintah dapat mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

b. Peran Internal Audit (X_2) Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara peran audit internal terhadap kualitas pelaporan keuangan. Dapat dipahami bahwa semakin tinggi kontribusi audit internal maka semakin tinggi pula kualitas pelaporan keuangan. Sebaliknya jika peran audit internal menurun maka kualitas pelaporan keuangan juga akan menurun. Keterlibatan yang tepat dalam audit internal dapat memfasilitasi peningkatan kualitas pelaporan keuangan, yang dapat dilakukan dengan memantau pelaporan keuangan secara berkala setiap tiga bulan untuk setiap perusahaan sepanjang tahun. Peran audit internal selain memantau laporan keuangan juga memberikan nasihat dan mengevaluasi berjalannya sistem pengendalian internal di grup Indojoya atau sebaliknya. Auditor internal harus mempunyai sikap tegas, jujur, dan obyektif agar tidak mendiskreditkan profesi audit, serta laporan hasil audit harus sesuai dengan keadaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Omasrianto dkk. (2017), berpendapat bahwa kontribusi audit internal secara keseluruhan berdampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

c. **Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_1) dan Peran Internal Audit (X_2) Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)**

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan teori dimana apabila pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sudah dilakukan dengan baik dan benar sehingga menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Serta mewujudkan fungsi analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah yang laporan keuangan itu pada akhirnya dapat menjadi suatu informasi untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah dalam rangka menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kerjanya. Kemudian dengan adanya audit internal, seharusnya perusahaan tidak banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan pada laporan keuangan perusahaan tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga. Dengan adanya hal tersebut audit internal diharapkan meningkatkan kualitas dan kerjasama dengan eksternal yang baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan. Jika terjadi penyimpangan di dalam perusahaan, maka audit internal harus memberikan solusi agar perusahaan dapat memperbaiki laporan keuangan yang disajikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan karena sistem informasi akuntansi merupakan kemampuan sistem informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah valid atau benar serta memberikan informasi kepada pengambil keputusan ketika mereka membutuhkannya, sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatannya untuk mempengaruhi keputusan.
2. Peran Internal Audit secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pada Pemerintah Kota Medan. Peran internal audit memiliki pengaruh dalam menunjang kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Medan sebagai pengawas intern dan mencegah terjadinya penyimpangan yang disebabkan oleh pihak tertentu.
3. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan peran internal audit secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pada Pemerintah Kota Medan. Dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi serta adanya peran internal audit dapat mengukur dan menilai kinerja pemerintah dalam rangka menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kerjanya melalui kualitas laporannya.

5.1. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat lebih meningkatkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi agar kualitas laporan keuangan semakin membaik karena aspek tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Medan.
2. Pemerintah Kota Medan perlu terus meningkatkan peran inspektorat dan staf akuntansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar kualitas laporan keuangan menjadi semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Ahmad Yani. (2020). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. (2018). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arief, Wibowo. (2008). *Kajian Tentang Perilaku Pengguna Sistem Informasi Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)*. Jakarta.
- Astuti. (2019). *Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Pasaman Barat)*. Skripsi. FE UNP
- Bastian, Indra (2019). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Erlangga
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Fikri, Miftahul. (2018). *Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Instansi Pemerintah Kota Padang*. Skripsi. UNP
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hamdani, Sugita. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Di Pemerintahan Kota Bandung)*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.

- James, A. Hall. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Jones, Gregory. Jeanot, Blanchet. (2018). *Assensing Quality Of Financial Reporting*, Accounting Horizons, Vol 14. Nomor 3.
- Kuncoro, Mudrajad. (2019). *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Noerdiawan, Dedi. (2019). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Omasrianto, Hasbudin, & Mas'ud. (2017). *Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Audit Internal Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Universitas Halu Oleo*. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 2(1).

- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, Dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110)
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan
- Purwanti, Meilani, and Wasman Wasman. (2014). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Bandung)*. Esensi
- Rosita. (2017). *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Untuk Menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dengan Persepsi Kemudahan Dan Sikap Atas Penggunaan Sebagai Variabel Antara (Studi Pada SKPD Kota Solok)*. Skripsi. FE UNP
- Roviyantie, Devi. (2011). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Siliwangi
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.

- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Sawyer, Lawrence B, (2014). *Internal Auditing*. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suwardjono. (2018). *Teori Akuntansi : Perencanaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga*. BPFE, Yogyakarta
- Soemarso S.R. (2018). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat
- Umar, Husein. (2020). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wahyono, Teguh. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Winidyaningrum, Celviana. (2010). *Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi*. *Jurnal SNA X111*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Yenita, Devi. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD (Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Daerah Di Kota Padang)*. Skripsi. FE UNP
- Yuliani, Syafrida. (2017). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)*. *Jurnal telaah dan riset akuntansi* Vol 3 No 2 hal 206-220.